

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN JENEPONTO

Selviana^{1*}, Burhanuddin², Samsir Rahim³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the role of the government as a regulator, dynamicator and facilitator in empowering farmer groups in Turatea Timur Village, Tamalatea District, Jeneponto Regency. Researchers use phenomenological types to find out what problems occur and develop information and obtain data obtained by researchers during in-depth interviews. The results showed that related to the Government's Role in Empowering Farmer Groups in Turatea Timur Village, Tamalatea District, Jeneponto Regency, it had not been fully implemented optimally. it's just that the implementation is not entirely good because there are still those who have not carried out the rules in accordance with applicable regulations. The government as (2) dynamo, namely (a) Socialization, (b) Assistance, (c) Training, and (d) Field Visits which also cannot be said to be fully optimal because there are still several obstacles in its implementation. And the Government as (3) a facilitator who provides superior seeds, fertilizers and production facilities has been able to facilitate farming communities quite well.

Keywords: *role of government, empowerment of farmer groups*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Peneliti menggunakan tipe fenomenologi guna mengetahui masalah apa yang terjadi dan pengembangan informasi serta perolehan data yang diperoleh peneliti pada saat dilakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari aspek pemerintah sebagai (1) regulator aturan/mekanisme, kebijakan pemerintah sudah jelas dalam Perda dan Permen hanya saja pelaksanaannya belum sepenuhnya baik dikarenakan masih ada yang belum menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah sebagai (2) dinamisator yaitu (a) Sosialisasi, (b) Pendampingan, (c) Pelatihan, dan (d) Kunjungan Lapangan yang juga sepenuhnya belum dapat dikatakan maksimal karena masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dan Pemerintah sebagai (3) fasilitator yang menyediakan bibit unggul, pupuk dan sarana produksi sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan cukup baik.

Kata kunci: peran pemerintah, pemberdayaan kelompok tani

* selviana@gmail.com

PENDAHULUAN

Telah diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya Pada Bab III mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya bahwa dalam hal pembangunan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat maka pemerintah harus mampu menerapkan serta melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat harus membutuhkan pelayanan dari pemerintah. Pelayanan oleh pemerintah harus mencakup semua bidang, salah satunya yaitu pelayanan terhadap pembangunan sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah tidak terlepas dari bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat. Melihat apa yang terjadi saat ini bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi di kalangan masyarakat begitu pesat, sehingga dapat mengindikasikan untuk semua

masyarakat harus mampu mempersiapkan dirinya untuk terus mengembangkan potensinya yang kemudian tidak hanya bersumber dari kalangan masyarakat saja akan tetapi juga menjadi tugas utama pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus tetap berperan aktif dalam pengawasan dan membantu masyarakat dalam menyelenggarakan tugas dan tanggungjawab pemerintah sehingga mampu mengambil bagian yang strategis demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya maka jelaslah bahwa pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap pertanian. Peran pemerintah diperlukan sanggup menaruh peranan penting dan sanggup memberi sumbangsi yang positif pada masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dengan harapan pemerintah mampu menjadi objek dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, mengedepankan perkembangan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat dalam kaitanya menggunakan bidang pertanian.

Untuk mengembangkan dan memajukan negara maka perlu adanya peranan yang aktif oleh pemerintah kepada masyarakat untuk

mengembangkan segala potensi yang dimiliki masyarakat, menurut (Arif, 2012) dalam (Nurdin et al., 2014) bahwa ada tiga dasar peran pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu :Pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (Regulator). Pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat (Dinamisator). Pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib (Fasilitator).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa desa Turatea Timur memiliki 19 kelompok tani yang terdiri dari 20 sampai 25 anggota dari setiap kelompok sehingga anggota kelompok tani secara keseluruhan di Desa Turatea Timur berjumlah 431 orang. Desa Turatea Timur mempunyai empat dusun yang masing-masing mempunyai kelompok tani, diantaranya dusun Malopua dengan tiga kelompok tani, dusun Ranaloe tujuh kelompok tani, dusun

Kallongerasa lima kelompok tani dan dusun Manrumpa empat kelompok tani.

Pemerintah mendukung kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berbisnis. Sedangkan untuk pelaksanaan bantuan bibit jagung atau padi kepada anggota kelompok tani di Desa Turatea Timur tidak berjalan secara efisien. Faktanya yang dikemukakan oleh anggota kelompok tani desa Turatea timur, bahwa bantuan bibit jagung dari Dinas Pertanian itu sangat lambat disalurkan, oleh karena itu masyarakat petani membeli bibit untuk ditanam dan tidak sempat menggunakan bibit dari pemerintah, bukan hanya itu kualitas bibit dari Pemerintah Dinas Pertanian juga menurut masyarakat mempunyai kualitas yang kurang baik karenanya masyarakat lebih memilih untuk membeli bibit, jadi bibit dari pemerintah itu kadang digunakan dan kadang hanya disimpan saja. Tak hanya itu, informasi mengenai pembagian alat pertanian seperti pompa air untuk anggota kelompok tani pun tidak jelas mengenai jadwalnya, ada yang mendapat secara langsung melalui pendataan, dan ada yang mendapat bantuan karna ada hubungan kekerabatan dengan pemerintah kabupaten.

Kelompok tani melakukan berbagai jenis kegiatan pertanian untuk meningkatkan kelompok taninya. Namun dalam praktiknya, masih ada anggota kelompok tani yang belum memiliki kapasitas dan potensi untuk mengelola pertanian yang ada. Masih ada kelompok tani yang belum bekerja sesuai harapan karena pelatihan dan pendampingan yang kurang dari Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan sehingga sebagian kelompok tani di Desa Turatea Timur Kabupaten Jeneponto masih relatif rendah dalam aspek pengetahuan dan keterampilan. Keterlibatan masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan lahan, dimana kualitas sumber daya masyarakat lemah kreativitas, sehingga menyebabkan pemasaran menjadi rendah. Yang dimana seharusnya kelompok tani itu harus memiliki anggota kelompok tani dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki sebagai seorang kelompok tani, hal ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan pemahaman atau memberikan bimbingan, terkait pengelolaan pertanian secara langsung, atau mendidik petani.

Kurangnya keterlibatan pemerintah untuk turun kelapangan melihat kondisi yang terjadi dilapangan, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara

serta observasi dari peneliti saat melakukan kunjungan lapangan di Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Penyuluhan ataupun sosialisasi tentang masalah pertanian pun sangat jarang dilakukan pemerintah desa turatea timur kepada para kelompok tani. Problem kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dan praktek ini disebabkan karena peran pemerintah dalam memberikan pemahaman serta mensosialisasikan solusi bagi setiap permasalahan masyarakat petani benar-benar tidak maksimal. Hal ini merupakan kendala dalam proses pemberdayaan kelompok tani karena memberdayakan kelompok tani membutuhkan partisipasi dan rasa ingin bergerak untuk maju namun kenyataannya hal demikian tidak terjadi. Karena ketua kelompok tani masih kurang memberikan arahan-arahan kepada anggota kelompok tani tentang bagaimana mereka mengelola pertanian, bahkan dalam kelompok tani pun jarang sekali melakukan pertemuan, pertemuan ini sangat penting dilakukan kelompok tani agar bisa saling bertukar informasi dan pengetahuan sebagai sesama petani.

Dalam KBBI, Peran menurut Abdulsyani (2012) adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak

dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Pengertian peran menurut (Soekanto & Sulistyowati, 2015) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan menjalankan hak kewajibannya. Dari sudut pandang yang lain, peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Purwardaminta, 1999).

Pemerintah secara etimologi di jelaskan oleh (Aiisiah et al., 2012) berasal dari kata pemerintah, sedangkan arti kata pemerintah berasal dari kata perintah. namun dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI kata-kata tersebut mempunyai arti yakni, perintah adalah perkataan yang menyuruh atau memberi arahan melakukan sesuatu kepada seseorang.

Dijelaskan oleh (Davey & Patrick, 2003) bahwa pemerintah memiliki lima fungsi utama dimana diantaranya pertama pemerintah sebagai penyedia

layanan artinya bahwa fungsi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan yang mana orientasinya tertuju pada lingkungan dan masyarakat. Kedua, fungsi pengaturan yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Yang selanjutnya ketiga pemerintah berfungsi dalam bidang pembangunan yang mana fungsi tersebut berhubungan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yang mewakili masyarakat diluar wilayah mereka dan yang terakhir fungsi pemerintah dalam pengkoordinasian perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik swasta ataupun organisasi pemerintah dan menjadi salah satu fungsi utamanya yang harus dilakukan oleh pucuk pimpinan yang menjadi pemimpin organisasi.

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris "*impowerment*" yang dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena power bukan sekedar daya tapi juga kekuasaan sehingga kata "daya" tidak sengaja bermakna "mampu" tapi juga bermakna "mempunyai kekuasaan" (Wrihatnolo et al., 2007)

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya (Sumodiningrat, 1999).

Menurut Dhal (1963) dalam buku (Mardikanto & Soebiato, 2019) pemberdayaan yang berasal dari kata *empowerment*. Sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan (*power*). Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan “kekuatan” atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak yang lainnya lagi.

Kelompok tani adalah kelembagaan pertanian atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal,

akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusaha tani, kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hamparan lahan usahatani (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2012).

Sebagai bentuk partisipasi pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan negara maka perlu adanya peranan yang aktif kepada masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan memberikan peranan secara aktif kepada masyarakat menurut (Arif, 2012) dalam (Adhawati, 2015) mengemukakan bahwa ada tiga dasar peran pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: a. Pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme; b. Pemerintah sebagai dinamisor, pemerintah sebagai dinamisor merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat, peran pemerintah sebagai dinamisor berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata social di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam partisipasi pemerintah, maka bimbingan, arahan, dan masukan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk lebih mengembangkan pembahasan terkait dengan dinamisor kemudian diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu (1)

sosialisasi, (2) pendampingan, (3) pelatihan, dan (4) kunjungan lapangan. Sosialisasi yang memiliki pengertian secara umum yaitu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pendampingan dalam hal ini dipahami sebagai suatu kegiatan yang menempatkan tenaga ahli dibidang pemberdayaan kelompok tani yang mampu komunikasi, mengarahkan dan memberi motivasi kepada masyarakat. Kemudian pelatihan ialah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, dan pengalaman bagi masyarakat. Kunjungan lapangan adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terjadwal kesuatu lokasi dengan secara langsung meninjau dan memperhatikan situasi dan kondisi lapangan. c. Pemerintah sebagai Fasilitator, pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasi kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan

dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh dari proses observasi, wawancara dengan seluruh informan yang telah ditentukan, dan hasil dari dokumentasi atau pengumpulan arsip dan gambar. Setelah seluruh data diperoleh tahap selanjutnya peneliti mendeskripsikan secara utuh dan mendalami data yang didapatkan berupa fakta atau informasi untuk menunjukkan adanya kelemahan atau kekurangan dari objek yang diteliti tentang Peran Pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Turatea Timur Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi. yaitu Tipe penelitian

yang memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah- masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan.

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen). 1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani. 2. Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang dikumpulkan peneliti adalah data tataguna lahan, data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani, dan laporan-laporan terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Turatea Timur Kabupaten Jeneponto.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah : 1) Observasi Peneliti melakukan

pengamatan terhadap Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanpa perantara dari orang lain serta membuat matrix pedoman observasi yang sesuai dengan indikator pada kerangka pikir. Adapun objek yang hendak diteliti adalah bagaimana Peran Pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator di Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 2) Wawancara Peneliti melakukan wawancara yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pedoman matrix wawancara yang sesuai dengan indikator kerangka pikir, kemudian membuat jadwal atau janji dengan informan yang hendak diwawancarai. Adapun informan yang hendak diwawancarai yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan atau informasi terhadap pertanyaan yang hendak diajukan peneliti. 3) Dokumentasi Dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencacatan sumber-sumber informasi baik berupa karangan, memo, pengumuman, atau aturan instansi pemerintahan. Adapun dokumen yang dikumpulkan yaitu data terkait peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator di Desa

Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang diciptakan pemerintah dalam memberikan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk konsep pemikiran yang dituangkan serta pelaksanaannya ditengah masyarakat. Untuk melihat Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dapat dilihat melalui tiga indikator yang dikemukakan oleh (Arif, 2012) dalam (Adhawati, 2015) yaitu peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Peran pemerintah sebagai regulator dimana di dalamnya terdapat aturan mendasar tentang mekanisme pemberdayaan serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah sebagai dinamisator di dalamnya terdapat peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan, kemudian indikator ketiga pemerintah sebagai fasilitator dimana di dalamnya terdapat peran pemerintah terhadap hal pengadaan bibit unggul, pengadaan pupuk, pestisida dan sarana produksi untuk pemberdayaan petani.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator dalam Pembedayaan Kelompok Tani

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aturan/mechanisme serta kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan kelompok tani, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa yang terjadi di masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan yang jelas dari pemerintah untuk menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan diberdayakan, dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh pihak Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL bahwa bukan hanya masyarakat awam saja yang kurang paham dengan regulasi yang berlaku tetapi PPL selaku pemerintah kecamatan yang melaksanakan tugas pemberdayaan juga kurang paham dengan aturan yang berlaku, sedangkan regulasi tentang pemberdayaan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani serta dipertegas lagi agar lebih terperinci untuk menyesuaikan kebutuhan pemberdayaan dengan daerah pemberdayaan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Kelompok Tani.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Pemerintah sebagai dinamisator merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan serta arahan yang efektif secara menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar terhadap peran pemerintah dalam memberikan bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat diperlukan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan, bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan segala kegiatan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan dialog dengan

masyarakat. Pada dasarnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Turatea Timur melalui pertemuan dengan para anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk membahas mengenai masalah atau kendala apa saja yang dihadapi masyarakat petani serta membantu menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada masyarakat dengan pemerintah memberikan arahan serta membantu petani menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari peneliti terkait sosialisasi yang dilaksanakan di daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana sosialisasi hanya dilakukan sewaktu-waktu, walaupun punya jadwal tersendiri dari pihak Penyuluh Pertanian Lapangan, tapi dalam pengadaan sosialisasinya itu sendiri kadang terlaksana dan kadang tidak. Dan hasil yang didapatkan dari sosialisasi tersebut pun hanya sekedar kegiatan program pemerintah yang dijalankan ke masyarakat tanpa masyarakat petani pahami nilai dari kegiatan tersebut. Permasalahan dari masyarakat juga tidak diatasi secara berkelanjutan di kegiatan sosialisasi pemerintah.

Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani adalah suatu kegiatan yang menempatkan tenaga yang ahli di bidang pemberdayaan kelompok tani yang mampu berkomunikasi, mengarahkan dan memberi motivasi kepada masyarakat dalam upaya untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada masyarakat tani untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian terkait bentuk pendampingan yang dilakukan PPL kepada masyarakat petani maka dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah Penyuluh Pertanian Lapangan kepada masyarakat itu sangat kurang bahkan sangat jarang dilakukan, meskipun pihak dari Dinas Pertanian Kabupaten Jenepono sudah memberikan tugas kepada pelaksana PPL untuk sering kelapangan mendampingi masyarakat namun karena jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas dalam mendampingi 19 masyarakat kelompok tani serta kondisi PPL Desa Turatea Timur yang kurang sehat untuk mendampingi masyarakat kelompok

tani sehingga pendampingan yang dilakukan tidak massif.

Pelatihan

Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi masyarakat kelompok tani. Pelatihan pemberdayaan masyarakat juga merupakan instrumen yang secara efektif untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat tani.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait dengan aspek pelatihan dapat disimpulkan bahwa pada aspek pelatihan kepada masyarakat kelompok tani pemerintah itu masih kurang aktif dalam memberikan pelatihan, dilihat dari pernyataan beberapa informan. Kurang aktifnya pemerintah dalam memberikan pelatihan serta kurangnya pula minat partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap program yang diadakan oleh pemerintah itu karena kurangnya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah desa dengan kabupaten yang kemudian menjadikan pemerintah desa sendiri kurang dilibatkan dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat petani di daerahnya sendiri, sehingga pada aspek ini dapat dikatakan pemerintah dari pihak Penyuluh

Pertanian Lapangan itu tidak berhasil dalam melaksanakan pelatihan di Desa Turatea Timur.

Kunjungan Lapangan

Merupakan kunjungan yang terencana dan terjadwal ke lokasi desa yang akan diberdayakan. Dalam hal kunjungan lapangan dengan tujuan untuk mengamati masalah yang terjadi di lapangan serta menjadi ajang dalam pengawasan untuk terus mengawasi atau memantau segala bentuk aktivitas masyarakat.

Berdasarkan dari keterangan yang disampaikan informan setelah diwawancarai maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak pemerintah baik dari pihak Dinas Pertanian maupun dari pihak Penyuluh Pertanian Lapangan itu sangat jarang atau kurang aktif dalam melakukan kunjungan lapangan sehingga jarang ditemui oleh masyarakat, karena itu masyarakat menganggap bahwa pemerintah masih kurang berperan aktif dalam melakukan kunjungan lapangan.

Selanjutnya berkaitan dengan indikator Dinamisator yang didalamnya terdapat sub indikator (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan Lapangan, menunjukkan bahwa dari sub indikator yang disebutkan secara keseluruhan tersebut

mengarah kearah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dimana sub indikator Sosialisasi hanya dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa adanya jadwal yang teratur sehingga hal ini tentunya akan berdampak kurang baik. Begitu juga dengan sub indikator pendampingan yang tidak terjadwal dimana hal tersebut mengakibatkan masih kurangnya bahkan sangat jarang pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan sehingga juga berdampak kurang aktifnya dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat kelompok tani. Selanjutnya pada sub indikator terakhir yaitu kunjungan lapangan, peneliti diperhadapkan pada kontradiksi pernyataan antara kedua pihak dalam program pemberdayaan ini dimana dari pihak pemerintah setempat berasumsi bahwa kunjungan langsung untuk meninjau lapangan telah terjadwal dan berlangsung secara rutin namun dari pihak masyarakat petani memberikan argumen sebaliknya, bahwa hal tersebut masih kurang. Peneliti kemudian menganalisis dan menyimpulkan dengan mempertimbangkan hasil observasi pada saat di lapangan bahwa memang dari segi kunjungan lapangan ini masih kurang dan belum optimal dikarenakan kunjungan lapangan yang dilakukan PPL itu tidak secara

menyeluruh kepada setiap kelompok tani.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah kepada masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal mengoptimalkan kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah sebagai fasilitator sudah semestinya harus menjadi agen yang mampu memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman dan nyaman. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendanaan dalam memberikan modal yang sesuai dengan kebutuhan.

berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang telah di wawancarai oleh peneliti serta hasil observasi peneliti terkait dengan aspek penyediaan bibit, pupuk, dan alat

pertanian lainnya (fasilitator) maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani sesuai dengan kebutuhannya, dengan demikian masyarakat sudah merasakan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah yang secara keseluruhan sudah sampai kepada masyarakat petani, meskipun ada beberapa kendala saat penyaluran bantuan yang menurut anggota kelompok tani itu agak lambat dalam menyalurkan bantuan serta ada beberapa bantuan yang secara kualitas belum bisa dikatakan baik seperti bantuan bibit jagung yang kadang kurang punya kualitas yang baik menurut masyarakat petani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut: 1) Pada aspek Regulator terkait dengan aturan/mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat kelompok tani pada umumnya sudah ada aturan yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani,

baik itu Peraturan Daerah ataupun Peraturan Menteri. Hanya saja untuk masyarakat tani tidak terlalu mengetahui atau memahami aturan terkait dengan pemberdayaan dikarenakan aturan tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Aturan atau kebijakan terkait dengan Pemberdayaan Kelompok Tani itu hanya diketahui oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan atau menjalankan aturan yang telah ditetapkan, sementara dari pihak pemerintah kecamatan itu masih kurang memahami aturan atau kebijakan yang berlaku dalam proses pemberdayaan, tapi disisi lain semua aturan pemerintah terkait dengan pemberdayaan petani telah diatur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten masing-masing sehingga pada aspek ini dianggap bahwa pemerintah telah mampu menyediakan aturan sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan kelompok tani pada aspek ini dianggap bahwa pemerintah telah mampu menyediakan aturan sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan kelompok tani. 2) Pada aspek Dinamisator yang dimana di dalamnya terdapat empat sub indikator yaitu : (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan Lapangan, menunjukkan

bahwa keempat sub indikator yang disebutkan itu belum sesuai dengan harapan masyarakat yang artinya bahwa dari keterangan yang telah diperoleh peneliti saat menemui informan mengindikasikan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sangat jarang dilaksanakan oleh pelaksana pemberdayaan yang dimana sosialisasi hanya dilaksanakan lima kali dalam satu tahun sementara pendampingan sangat jarang dilakukan karena tidak ada jadwal tertentu yang mengatur terkait pendampingan yang harus dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan, sementara pada sub indikator pelatihan dan kunjungan lapangan itu hampir sama dengan sub indikator sebelumnya bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat jarang dilaksanakan sementara masyarakat sangat butuh pengetahuan dalam mengelola pertanian agar hasil pertanian bisa lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan hasil produksi pertanian di daerah lain, begitupula dengan kunjungan lapangan bahwa dari jumlah kelompok tani yang terbilang banyak, sementara hanya beberapa kelompok tani yang mendapat perhatian dari Penyuluh Pertanian Lapangan padahal PPL itu sendiri punya pendamping yang selalu menemani ketika akan terjun ke lapangan, mungkin

karena kondisi PPL yang juga terbatas karena keadaan fisik yang mohon maaf kurang baik sehingga tidak dapat melaksanakan kunjungan lapangan dengan maksimal. 3) Pada aspek Fasilitator yaitu ketersediaan bibit, pupuk, alat pertanian dan sarana produksi lainnya bahwa pemerintah sebagai penyedia layanan untuk masyarakat sudah dapat dikatakan mampu memfasilitasi masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat sudah merasakan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah, hanya saja terkendala dengan proses penyaluran bantuan yang cukup lambat sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan bibit yang diberikan, juga kualitas bibit yang kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

REFERENSI

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan (Reguler)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adhawati. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Aiisiah, N., & Pamudji, S. (2012). Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap

- Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Jurnal Akuntansi*, 1, pp. 22–23.
- Davey, & Patrick. (2003). *At a Glance Medicine* (A. Rahmalia & C. Novianty (eds.); Cetakan 8). Jakarta: Erlangga.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat* (Kelima). Bandung: Alfabeta.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa*. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), p. 69.
- Purwardaminta. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cetakan 16). Jakarta: Balai Pustaka.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan* (Kedua). Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wrihatnolo, R, R., Dwidjowijoto, & Nugroho, R. (2007). *Manajemen pemberdayaan Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Gramedia